

ABSTRAK

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS 2 A KOTA SEMARANG.

Dalam skripsi ini yaitu membahas tentang hak dan kewajiban warga binaan di lapas perempuan kelas 2 A Kota Semarang. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban warga binaan lapas melibatkan berbagai pihak seperti warga binaan itu, petugas lapas, pemerintah dan anggota masyarakat. Peran serta dan kerja sama dengan berbagai pihak memudahkan proses pembinaan sehingga warga binaan dapat diterima di masyarakat setelah keluar dari lapas.

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan di lapas Perempuan kelas 2A Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan memakai pendekatan hukum yuridis sosiologis yaitu menggunakan hasil wawancara. Jenis data yang digunakan meliputi primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu kepustakaan dan penelitian lapangan berupa hasil wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis normatif deskriptif yakni menggambarkan tentang tinjauan yuridis mengenai hak dan kewajiban warga binaan. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas perempuan kelas 2A Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban WBP di lapas kelas 2A Semarang ada beberapa aspek yang sudah terpenuhi seperti kewajiban untuk piket dan mematuhi peraturan. WBP juga telah memperoleh hak untuk hidup layak walaupun masih ada batasan. Seperti hak untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk keberlangsungan hidup setelah keluar dari lapas. Kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban yaitu kegiatan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak hak-hak WBP yang terabaikan karena kurangnya sarana dan prasarana serta peran dari petugas. Hak tersebut meliputi hak untuk beribadah, hak memperoleh perawatan, hak memperoleh kesehatan dan hak menyampaikan keluhan. Diharapkan seluruh pihak yang terkait untuk segera mengatasi permasalahan yang terjadi dilingkungan pemasyarakatan yang mengakibatkan hak-hak WBP terabaikan sehingga terlambatnya pembinaan terhadap WBP dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan dan peningkatan harkat dan martabat serta kualitas WBP. Sistem Pembinaan di Lapas hendaknya dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai ketentuan jaminan HAM yang ada dalam UUD 1945 dan Undang-undang No.12 Tahun 1995 Kata kunci: Hak, kewajiban, warga bina

ABSTRACT

In this thesis which discusses the rights and obligations of Prisoners in women's prison class 2A in Semarang City. Fulfillment of the rights and obligations of prisoners of prison involves various parties such as the prisoner, prison staff, government and members of society.

This writing aims to determine the fulfillment of the rights and obligations of prisoners in women's prison class 2A in Semarang City and the obstacles that are faced in fulfilling the rights and obligations of prisoners in women's prison class 2A in Semarang City.

This research uses descriptive analysis research specifications. The type of research conducted is using a sociological juridical legal approach that is using interviews. The types of data used include primary and secondary. Data collection techniques used were literature and field research in the form of interviews. Analysis of the data in this research uses descriptive normative analysis which describes a juridical review of the rights and obligations of the prisoners. This research took place in the women's prison class 2A in Semarang City.

Based on the research conducted it can be known that the implementation of fulfilling the rights and obligations of WBP in prison class 2A in Semarang there are several aspects that have been fulfilled such as the obligation to picket and comply with regulations. WBP has also obtained the right to a decent life even though there are still restrictions. Like the right to attend entrepreneurship training for survival after leaving prison. Obstacles in fulfilling rights and obligations, namely activities are still not running as it should. There are still many WBP rights that have been neglected due to lack of facilities and infrastructure as well as the role of officers. These rights include the right to worship, the right to receive care, the right to health and the right to submit complaints. It is expected that all parties concerned to immediately overcome the problems that occur in the correctional environment that resulted in the rights of WBP neglected so that the delay in the guidance of WBP in the context of achieving the goals of correctional and increase the dignity and quality and quality of WBP. Guidance system in prison should be carried out by implementing various human rights guarantee provisions in the 1945 Constitution and Law No.12 of 1995.

Keywords: Fulfillment, obligations, Prisoners